

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah data dipaparkan dan menghasilkan temuan-temuan, maka selanjutnya adalah mengkaji hakekat dan makna temuan penelitian. Masing-masing temuan akan dibahas dengan mengacu pada teori dan pendapat para ahli yang sesuai, diantaranya sebagai berikut:

A. Perencanaan lembaga pendidikan nonformal dalam mengoptimalkan layanan kepada masyarakat di PKBM Tunas Pratama

Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan di PKBM Tunas Pratama Kota Blitar perencanaan PKBM dilakukan dengan sistematis. Perencanaan menjadi hal penting untuk mencapai sebuah tujuan. Terlebih pada pendidikan nonformal yang menjadi bagian dari tantangan bagi perencana pendidikan. Menurut Sudjana dalam bukunya Manajemen Program Pendidikan, prinsip perencanaan pendidikan luar sekolah merupakan proses sistematis karena menggunakan prinsip-prinsip tertentu, prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisir.¹⁸⁵ Maka bisa dikemukakan keputusan yang diambil dalam perencanaan berkaitan dengan rangkaian tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Proses pengambilan keputusan tersebut dimulai dengan perumusan tujuan dan kebijakan dalam rencana yang lebih rinci berbentuk program-program untuk dilaksanakan, dan sasaran secara luas.

Selanjutnya Sudjana dalam bukunya Manajemen Program Pendidikan juga mengungkapkan bahwa perencanaan yang diterapkan dalam pendidikan nonformal dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perencanaan alokatif (*allocative planning*) dan perencanaan inovatif (*innovative planning*). Perencanaan alokatif (*allocative planning*) ditandai dengan upaya penyebaran atau pembagian (alokasi) sumber-sumber yang jumlahnya terbatas kepada

¹⁸⁵ Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan: untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2004), hal. 57

kegiatan-kegiatan dan pihak-pihak yang akan menggunakan sumber-sumber tersebut yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan sumber-sumber yang akan disebarkan. *Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)* merupakan salah satu contoh yang sering digunakan dalam tipe perencanaan alokatif.¹⁸⁶

Hal ini sesuai dengan yang dilaksanakan di PKBM Tunas Pratama, dimana pola perencanaannya melalui cara merencanakan (*Planning*), memprogram (*Programming*), kemudian menganggarkan (*Budgeting*). *Pertama*, PKBM Tunas Pratama merencanakan pembentukan PKBM dengan menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan. Dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dimuat hal-hal yang perlu disiapkan untuk pembentukan PKBM yaitu dengan merencanakan pelaksanaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis kegiatan, data calon warga belajar, penyediaan pendidik atau tutor, sarana prasarana, media dan alat pembelajaran, data pengelola serta rencana anggaran dana. Perencanaan diawali dengan perumusan dan penetapan visi misi dan tujuan lembaga. PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal dan wadah pembelajaran masyarakat harus menetapkan visi misi dan tujuan yang jelas untuk pendidikan atau pemberdayaan masyarakat sesuai dengan fungsi dan perannya. Karena PKBM adalah suatu institusi berbasis masyarakat (*Community Based Institution*), maka selanjutnya tahap sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat tentang perlunya pendirian PKBM.¹⁸⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Mustafa Kamil dalam bukunya Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia yang menyebutkan bahwa PKBM adalah salah satu lembaga pendidikan nonformal yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh

¹⁸⁶*Ibid*, hal. 66

¹⁸⁷Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, *Standard dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*, (Jakarta, 2012), hal. 4

lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.¹⁸⁸

Kedua, Setelah tahap sosialisasi maka selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang akan menentukan jenis kegiatan atau program apa yang akan dikembangkan melalui musyawarah. PKBM Tunas Pratama pada tahun berdiri kondisi Kota Blitar masih banyak masyarakat yang buta aksara dan putus sekolah bahkan ada juga yang belum mengenyam pendidikan. Sehingga program yang direncanakan adalah program keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan Taman Baca Masyarakat (TBM). Namun setelah tahun 2015 Kota Blitar dinyatakan sudah bebas buta aksara, sehingga di tahun tersebut program keaksaraan dihentikan. Saat itu dikeluarkan kebijakan bahwa semua anak punya kesempatan untuk sekolah dimana saja selama lembaga negeri dan bebas biaya. Tidak ada namanya sulit mencari sekolah dan rebutan mencari sekolah, selain itu juga diberlakukan adanya sistem zonasi. Jadi PKBM Tunas Pratama mengganti program dengan merencanakan pendidikan kesetaraan, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Keterampilan. Hal ini menunjukkan PKBM hadir sebagai lembaga alternatif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sesuai dengan pernyataan Abdul Rahmat dalam bukunya Manajemen Pemberdayaan pada Pendidikan Nonformal bahwa ruang lingkup dan karakteristik pendidikan nonformal adalah dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program pendidikan nonformal lebih berorientasi pada kebutuhan pasar (masyarakat) tanpa mengesampingkan aspek akademis.¹⁸⁹

Ketiga, penentuan program telah terbentuk selanjutnya PKBM Tunas Pratama melakukan perencanaan penganggaran (*Budgeting*). Hal ini berkaitan dengan rencana kerja tahunan yang meliputi: peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta peran serta masyarakat dan

¹⁸⁸Mustofa Kamil, *Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Komunikan di Jepang)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 3

¹⁸⁹Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Nonformal*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hal. 29

kemitraan. Adapun dalam penyusunan anggaran tentu memperhatikan sumber dana. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber, yaitu a) pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; b) orang tua atau peserta didik; c) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.¹⁹⁰ Pada proses ini harus mengacu pada prinsip-prinsip dalam manajemen pembiayaan lembaga pendidikan yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.¹⁹¹ Pembiayaan PKBM Tunas Pratama didapatkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (APBN dan APBD) melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kota Blitar dari peserta didik.

Penerapan perencanaan alokatif di PKBM Tunas Pratama diperkuat dengan beberapa teori tipe perencanaan yang sesuai pendapat Friedman dalam Sudjana, perencanaan alokatif dapat dikategorikan kedalam empat tipe, yaitu perencanaan berdasarkan perintah (*command planning*), perencanaan berdasarkan kebijakan (*policies planning*), perencanaan berdasarkan persekutuan (*corporate planning*), dan perencanaan berdasarkan kepentingan peserta (*participant planning*). *Pertama*, Perencanaan berdasarkan perintah (*command planning*) adalah perencanaan yang berbasis pada penguasa suatu wilayah yang kemudian diimplementasikan ke bawah tanpa melibatkan masyarakat. *Kedua*, perencanaan berdasarkan kebijakan (*policies planning*) merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. *Ketiga*, perencanaan berdasarkan persekutuan (*corporate planning*) merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dimana kegiatan perencanaan tersebut lebih

¹⁹⁰ Depdiknas, *Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah oleh Direktorat Tenaga Pendidikan*, (Jakarta: Dirjen PMPTK, 2007), hal. 50

¹⁹¹ Arwildayanto, Nina Lamatenggo dan Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2017), hal. 9

menekankan kepada emansipasi kemanusiaan terhadap penindasan sosial, dengan prinsip kebebasan adalah hak individu yang dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. *Keempat*, perencanaan berdasarkan kepentingan peserta (*participant planning*) merupakan perencanaan yang memiliki 2 (dua) implikasi, yaitu pemodelan yang merupakan sumber utama bagi pembelajar dan pentingnya pemahaman ketangguhan dan keterampilan pengaturan diri pribadi untuk menjadi pembelajar yang tangguh.¹⁹²

Perencanaan berdasarkan perintah (*command planning*) ditunjukkan pada perencanaan proses pembelajaran pendidikan kesetaraan secara daring atau *online* atas inisiasi Dinas Pendidikan Kota Blitar. Sebenarnya inisiasi ini ditujukan untuk seluruh PKBM yang ada di Kota Blitar, namun yang mampu merealisasikan masih PKBM Tunas Pratama sejak 2019. Perencanaan proses pembelajaran secara daring awalnya hanya bagi warga belajar program sekolah reguler yang bekerja dan berusia di atas 21 tahun serta domisilinya berada di luar wilayah Blitar Raya. Baru setelah adanya pandemi proses pembelajaran secara online diberlakukan untuk seluruh warga belajar.

Perencanaan berdasarkan kebijakan (*policies planning*) ditunjukkan pada perencanaan penggunaan kurikulum 2013 (K13) atas kebijakan bahwa semua PKBM maksimal tahun 2020 harus sudah menggunakan kurikulum 2013 (K13). Namun karena dirasa belum memungkinkan diterapkan secara penuh, maka PKBM Tunas Pratama membuat sedikit perubahan dengan tetap berusaha adaptif menyesuaikan pedoman resmi K13. Jika mengikuti K13 secara utuh, maka proses pembelajaran harus dilaksanakan selama hari Senin-Jum'at, tetapi hal ini belum memungkinkan bagi PKBM Tunas Pratama. Sehingga pengambilan keputusan dengan membuat jadwal pasti Senin-Rabu, Kamis-Jum'at itu adalah ekstensi pembelajaran. Warga belajar memahami bahwa pembelajaran hanya selama 3 (tiga) hari, padahal sebenarnya berlaku selama 5 (lima) hari karena 2 (dua) hari pembelajaran secara mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Saat ini sedang

¹⁹²Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan, ...*, hal. 58

perencanaan penambahan pembelajaran di hari Kamis yang juga didampingi oleh tutor dalam bentuk KULWAP (Kuliah Whatsapp).

Perencanaan berdasarkan persekutuan (*corporate planning*) ditunjukkan pada perencanaan adanya sekolah pondok yang bermitra dengan LPQ Dzikrul Qur'an Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat Kota Blitar. Perencanaan ini berawal dari Pimpinan pondok pesantren berinisiasi mengadakan jalinan kerjasama dengan PKBM Tunas Pratama Kota Blitar dalam rangka agar santrinya mendapat ijazah kesetaraan sehingga santrinya lulus dari pesantren tidak hanya sebagai seorang *tahfidzul qur'an* saja tetapi juga diakui sebagai lulusan sekolah yang setara dengan sekolah formal. Selama ini stigma masyarakat menganggap bahwa lulusan pondok tidak bisa disetarakan dengan mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah formal, untuk menepis hal tersebut pimpinan menjalin kerjasama dengan PKBM Tunas Pratama Kota Blitar. Maka selanjutnya PKBM Tunas Pratama mendesain kurikulum seperti apa yang sesuai dan sistem pembelajaran yang bagaimana.

Perencanaan berdasarkan kepentingan peserta (*participant planning*) ditunjukkan pada perencanaan penentuan program-program yang dibutuhkan masyarakat, khususnya pada program kecakapan kewirausahaan (PKW) dimana program ini dilaksanakan secara insidental sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini juga ditentukan adanya kucuran dana dari pemerintah, ketika dapat mengajukan anggaran dan anggaran tersebut diterima serta dapat dicairkan maka program akan bisa diselenggarakan. Tutor pada program ini didatangkan dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Teori *participant planning* ini memiliki 2 (dua) implikasi yaitu *pertama* adalah pemodelan yang merupakan sumber utama bagi pembelajar. Hal ini sesuai pada program PKW warga belajar mendapat ilmu dari model seorang narasumber yang ditunjuk menjadi tutor. Selain itu perencanaan pembelajaran tambahan (mulok) pada pendidikan kesetaraan tentang bimbingan dan pendidikan psikologi termasuk perencanaan berdasarkan kepentingan peserta. Implikasi *kedua* adalah pentingnya pemahaman ketangguhan dan

keterampilan pengaturan diri pribadi untuk menjadi pembelajar yang tangguh. Hal ini sesuai dengan tujuan diberlakukan pemberian materi bimbingan konseling dan pendidikan kesetaraan yang menunjukkan bahwa PKBM Tunas Pratama memprioritaskan kesehatan mental serta kesiapan warga belajar untuk berdiri secara mandiri sebagai bagian dari masyarakat dan tetap semangat untuk meningkatkan kualitas diri.

B. Pengorganisasian lembaga pendidikan nonformal dalam mengoptimalkan layanan kepada masyarakat di PKBM Tunas Pratama

Pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dalam sebuah sistem manajemen. Pengorganisasian bisa dikatakan sebagai urat nadi bagi suatu organisasi atau lembaga, sehingga fungsi manajemen ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi atau lembaga. Seperti halnya pada PKBM Tunas Pratama dimana ujung tombak pelaksanaan pengelolaan PKBM adalah pada jajaran pengurus harian (pengelola). Terry dalam Sudjana menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah dasar dari kegiatan manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹⁹³

Menurut Heidjarachman Ranupandojo dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen mengatakan bahwa pengorganisasian adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dilakukan dengan membagi tugas, tanggungjawab, dan wewenang diantara mereka, ditentukan siapa yang menjadi pemimpin serta saling berintegrasi secara aktif.¹⁹⁴ Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah dasar dari kegiatan manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan telah ditetapkan dapat dilaksanakan

¹⁹³Sudjana, *Manajemen Progam Pendidikan...*, hal. 35

¹⁹⁴Heidjarachman Ranupandojo, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996), hal. 35

secara efektif dan efisien.¹⁹⁵ Sedangkan pengorganisasian menurut Standard Minimal Manajemen (SMM) PKBM merupakan kegiatan menyiapkan dan menggerakkan sumber daya yang teridentifikasi, mengkaji dan menata sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan program kegiatan, menata pelaksanaan program kegiatan, menata tenaga kependidikan.¹⁹⁶

Pada PKBM Tunas Pratama pengorganisasian dilakukan oleh pengelola berdasarkan tanggungjawab dan wewenang dari setiap bagian. Pengorganisasian PKBM Tunas Pratama dengan membentuk struktur organisasi dan berjalan berdasarkan tugas pokoknya masing-masing. Ketua sebagai poros penyelenggara fungsinya mengorganisir para anggota yang dipimpin terutama pada pengambilan keputusan.

Mengingat pengelola adalah ujung tombak pelaksanaan pengelolaan PKBM, maka diperlukan adanya tempat kerja yang nyaman agar tercipta sebuah kekompakan. Iklim organisasi yang dibangun harus baik agar pelaksanaan segala program juga secara maksimal. Sudah masyhur dikalangan publik tentang *quote* “*Teamwork makes the dream work*” yang menjadi judul buku John C. Maxwell dengan maksud bahwa mewujudkan impian besar dengan bekerjasama. Hal ini lah yang dijadikan pegangan oleh pengelola PKBM Tunas Pratama. Terlebih para pengelola merasa bukan hanya sekedar *teamwork* namun lebih dari *familywork* sebutannya.

Stringger mendefinisikan iklim organisasi sebagai “*Collection and pattern of environmental determinant of aroused motivation*”. Artinya iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi.¹⁹⁷ Sementara itu, Tagiuri dan Letwin mengungkapkan bahwa iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relative secara berlangsung, dialami oleh anggota organisasi, mempengaruhi

¹⁹⁵ Sudjana, *Manajemen Progam Pendidikan, ...*, hal. 106

¹⁹⁶ Dewi Siti H., Masluyah dan Wahyudi, *Pengelolaan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, FKIP Universitas Tanjungura, Pontianak, hal. 4

¹⁹⁷ Stringer, *Motivation and Organizational Climate*, Internasional Businnes and Economics Research Journal Volume 2, 2002, hal. 68

perilaku mereka dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik atau sifat organisasi.¹⁹⁸ Dalam pandangan Stringer bahwa karakteristik atau komponen iklim organisasi mempengaruhi anggota organisasi untuk berperilaku tertentu. Menurutnya ada enam komponen untuk mengukur hal tersebut, meliputi struktur (*structure*), standar (*standard*), tanggungjawab (*responsibility*), penghargaan (*appreciation*), dukungan (*support*), dan komitmen (*commitment*).¹⁹⁹

Untuk mendapatkan komitmen yang terbaik dari anggota organisasi perlu adanya menciptakan hal yang mampu menunjangnya. Menurut hasil penelitian dari M. Nafis, Agus Zaenul F, dan F. Mujib dalam jurnal yang berjudul *Workplace Spirituality to Increase Institutions' Commitment and Meaning of Life* mengungkapkan bahwa nilai-nilai spiritualitas tempat kerja (*Workplace Spirituality*) dapat meningkatkan komitmen dan makna hidup pegawai pada lembaga melalui beberapa hal. *Pertama*, nilai yang dapat meningkatkan komitmen kerja yakni nilai kebersamaan, tanggungjawab, keadilan, kepercayaan, keikhlasan, integritas, inovatif dan profesional. *Kedua*, makna bekerja bagi mereka adalah panggilan moral, wujud syukur, memenuhi kebutuhan, ibadah, aktualisasi diri, perintah Allah SWT., bekerja sesuai tugas pokok. *Ketiga*, upaya yang dilakukan para pegawai yakni membangun suasana kerja dengan *workplace culture* dan *workplace climate*, meningkatkan kualitas institusi, mengadakan kegiatan yang bermanfaat, menambah infrastruktur untuk menunjang kegiatan, komunikasi yang bersahabat, media sosial sebagai sarana sosialisasi, diklat keagamaan atau pembinaan serta motivasi, menjalin kerjasama. *Keempat*, dampak dari spiritualitas tempat kerja bagi karyawan adalah merasa bangga pada lembaganya, merasa nyaman dan ada keakraban, membuat ingin mengaktualisasikan diri sebaik mungkin, menjadi lebih produktif dalam pekerjaan, menjaga adab, saling silaturahmi dan berbagi

¹⁹⁸ Tagiuri dal Letwin, *Organizational Climate, Exploration of a Concept*, Internasional Business and Economics Research Journal Volume 2, hal. 10

¹⁹⁹ Stringer, *Motivation and Organizational...*, hal. 68

informasi atau memberi masukan, kegiatan yang positif mewarnai instansi, menambah semangat dalam bekerja.²⁰⁰

Hasil penelitian diatas menggambarkan keadaan yang ada pada PKBM Tunas Pratama yakni beberapa nilai-nilai spiritualitas tempat kerja (*Workplace Spirituality*) telah tercipta di *circle* pengelola PKBM Tunas Pratama. Nilai kebersamaan, kepercayaan, integritas, profesional dan sebagainya tercermin pada setiap eksekusi pengelolaan PKBM. Keprofesionalan dan integritas ditunjukkan dengan ketika mereka penuh dengan keikhlasan harus berperan sebagai staf yang bekerja extra namun juga berperan sebagai tutor. Bagi pengelola mereka bekerja didasari adanya panggilan moral, wujud syukur dan aktualisasi diri. Salah satu staf menceritakan awal mula memilih untuk bergabung di PKBM dan sampai saat ini berjibaku didalamnya, karena selain lulusan dari pendidikan nonformal merasa terpanggil. Menurutnya jika berjibaku di dunia pendidikan nonformal hanya untuk memenuhi kebutuhan *financial* tentu tidak akan mendapat yang diharapkan hanya kelelahan yang didapat. *Workplace culture* dan *workplace climate* diselimuti dengan jalinan kekeluargaan yang ditunjang komunikasi bersahabat. Dalam kesehariannya sebelum mulai bekerja mengadakan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga dan bersepeda bersama untuk memupuk kekuatan rasa kebersamaan dan kepercayaan. Sehingga kenyamanan dan kegiatan yang positif mewarnai PKBM.

C. Pelaksanaan lembaga pendidikan nonformal dalam mengoptimalkan layanan kepada masyarakat di PKBM Tunas Pratama

Pelaksanaan program di PKBM Tunas Pratama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendidikan nonformal adalah salah satu upaya dalam mengembangkan kemampuan, keterampilan serta bakat anak didik yang nantinya sangat berguna dalam menyelesaikan tantangan hidup di lingkungan sosial. Selain itu, pendidikan nonformal juga sangat membantu

²⁰⁰ Muntahibun Nafis, Agus Z.F., dan F. Mujib., *Workplace Spirituality to Increase Institution Comitment and Meaning of Life*, Jurnal Episteme Pengembangan Ilmu Keislaman., Vol. 13, No. 1, IAIN Tulungagung Tahun 2018

dalam menjembatani kesenjangan yang terdapat pada pendidikan formal.²⁰¹ Program utama di PKBM Tunas Pratama adalah program pendidikan kesetaraan, segala tenaga dan pikiran difokuskan untuk membuat sistem yang tetap adaptif dengan berbagai macam peraturan yang ada namun tetap fleksibel dan tidak memberatkan warga belajar. Pelaksanaan proses pembelajaran di PKBM Tunas Pratama berlangsung selama 5 (lima) hari untuk sekolah reguler dan 2 (dua) hari untuk sekolah pondok, namun dibuat dengan beberapa sistem yang disesuaikan dengan kompetensi dan kondisi warga belajar. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup pendidikan nonformal dari segi waktu dimana waktu yang digunakan relatif singkat dan memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar sambil bekerja dan usaha.²⁰²

Menanggapi kebijakan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD mengenai penerapan dan penggunaan pembelajaran sistem kurikulum 2013 (K13) pada proses pembelajaran di pendidikan kesetaraan atau nonformal, PKBM Tunas Pratama segera merancang kurikulum untuk bertransformasi adaptif dengan regulasi tersebut. Dilansir dari Kominfo Jawa Timur, Konsultan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan seluruh tutor PKBM Jawa Timur menjelaskan bahwa pendidikan nonformal juga terkena zonasi sehingga peserta didik yang belum tertampung di sektor pendidikan formal bisa ke PKBM. Supaya hasilnya setara dengan formal, maka pendidikan kesetaraan juga harus menerapkan K13.²⁰³ Namun sampai saat ini pedoman yang benar-benar versi PKBM belum ada, sehingga implementasinya masih dengan versi masing-masing. Pada sekolah reguler PKBM Tunas Pratama merancang dengan membuat pola jadwal pasti Senin-Rabu, Kamis-Jum'at adalah ekstensi pembelajaran. Warga belajar memahami bahwa pembelajaran hanya selama 3 (tiga) hari, padahal sebenarnya berlaku

²⁰¹ Syafrudin Wahid, *Komunikasi pada Lembaga Pendidikan Nonformal : Suatu Kajian Dalam Latar Budaya Minangkabau*, (Jakarta: 2016), hal. 16

²⁰² Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan, . . .*, hal. 13

²⁰³ Kominfo Jatim, *Tahun Ajaran 2019/2020 Pendidikan Nonformal Mulai Terapkan K13*, dikutip dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/tahun-ajaran-2019-2020-pendidikan-non-formal-mulai-terapkan-k13> diakses pada 10 Juli 2019 pukul 06.23 WIB

selama 5 (lima) hari karena 2 (dua) hari pembelajaran secara mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Jika pembelajaran dilaksanakan penuh selama lima hari belum mungkin diterapkan di PKBM Tunas Pratama, karena dipastikan bagi warga belajar yang sedang bekerja akan keberatan dan berpengaruh pada semangat belajarnya.

Selain jadwal yang dirancang dengan fleksibel, sistem pembelajaran juga dirancang dengan baik dan tidak memberatkan warga belajar. Sistem pembelajaran di PKBM Tunas Pratama, Tatap Muka (TM)-Tutorial (T) dan Mandiri (M) bagi sekolah reguler dan sistem “Bloking” bagi sekolah pondok. Penyelenggaraan dengan sistem Tatap Muka (TM)-Tutorial (T) dan Mandiri (M) ini adalah inovasi sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan adanya regulasi bahwa semua PKBM harus sudah menggunakan kurikulum 2013 (K13). Sedangkan untuk sistem “Bloking” bertujuan untuk mempermudah penjadwalan dan supaya warga belajar tidak kebingungan dalam menerima materi pembelajaran. Hal ini menunjukkan salah satu prinsip kurikulum, yaitu fleksibilitas yang berarti tidak kaku dan ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak.²⁰⁴

Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Menurut Briggs dalam Rudi dan Cepi, menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran, seperti buku, film, video dan sebagainya.²⁰⁵ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan banyak kemudahan dan kemungkinan dalam membuat suatu perancangan dan pengembangan sistem pendidikan, khususnya konsep dan model pembelajaran *online* atau disebut dengan *E-Learning*. Sejak adanya instruksi dari inisiasi Dinas Pendidikan Kota Blitar yang mencanangkan seluruh PKBM di Kota Blitar, PKBM Tunas Pratama merespon baik dan segera merancang pembelajaran secara *online*. Jadi inovasi pelaksanaan pembelajaran secara daring atau

²⁰⁴ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.144

²⁰⁵ Rudi S. dan Cepi R., *Media Pembelajaran*, (Bandung: Jurusan Kurtekipend FIP UPI, 2008), hal. 6

berbasis *online* sejak jauh sebelum adanya pandemi memberikan dampak kesiapan yang lebih matang ketika semua lembaga pendidikan dipaksa untuk pembelajaran secara virtual. Selama pandemi PKBM Tunas Pratama memaksimalkan penggunaan media “Zoom” sebagai pengganti tatap muka di kelas dan “Edmodo” sebagai pemberian tugas pada sekolah reguler, sedangkan pondok tetap pembelajaran secara tatap muka.

Penerapan pembelajaran pendidikan psikologi dan bimbingan konseling di PKBM Tunas Pratama turut andil dalam mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. Psikologi pendidikan mempengaruhi perkembangan bagi anak. Seorang anak dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal bila mendapat dukungan dari sekitarnya.²⁰⁶ Orangtua dan pendidik harus punya pengetahuan dalam membimbing dan mendukung anak tersebut. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat besar. Dalam pembelajaran bimbingan konseling yang utama pemberian materi kesehatan mental (*mental health*), karena PKBM Tunas Pratama sangat memprioritaskan kesehatan mental serta kesiapan warga belajar untuk menjadi bagian dari masyarakat. Adelman dan Taylor mencatat bahwa masalah kesehatan mental dan stress adalah hambatan utama dalam belajar.²⁰⁷ Menurut hasil penelitian Nanang Erma Gunawan Dosen Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang mencermati tentang apa yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia mempertimbangkan sekolah sebagai agen kesehatan mental bagi para siswa sangat sesuai. Layanan kesehatan mental yang berbasis sekolah adalah desain yang paling mungkin dan sangat sesuai dilakukan sehingga sekolah bukan saja institusi akademis tetapi juga sekolah memiliki program yang bersifat menyamankan dan memberikan ruang kepada para siswa untuk tumbuh, berkembang, dan belajar untuk menghadapi persoalan psikologis yang dihadapi setiap hari. Layanan kesehatan mental berbasis sekolah memiliki potensi untuk menghilangkan hambatan belajar dan

²⁰⁶ Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), hal. 16

²⁰⁷ H. S. Adelman dan L. Taylor, *Promoting Mental Health in Schools in the Midst of School Reform*, *Journal of School Health*, Vol. 70, No. 2, hal. 171-178

membantu sekolah mencapai misinya dalam mendidik.²⁰⁸ Hal ini sesuai dengan program yang dilakukan di PKBM Tunas Pratama dimana pemberian materi kesehatan mental tersebut untuk menghilangkan hambatan belajar dan memberikan bekal warga belajar agar mampu berdiri secara kreatif, mandiri, dan berdayaguna sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu perencanaan semua mata pelajaran akan diintegrasikan dengan kesehatan mental diawali dengan memberikan pelatihan kepada semua tutor tentang kesehatan mental bertujuan untuk membantu sekolah mencapai misinya dalam mendidik.

D. Pengawasan lembaga pendidikan nonformal dalam mengoptimalkan layanan kepada masyarakat di PKBM Tunas Pratama

Pengawasan adalah tahap penentuan standar yang akan diraih, mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pengambilan keputusan yang ditujukan sebagai tindakan untuk merevisi kekurangan yang ada.²⁰⁹ Dalam pengelolaan pendidikan luar sekolah pengawasan mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Connor dalam Djudju Sudjana menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan, separuhnya ditentukan oleh pelaksanaan rencana dan setengahnya lagi oleh pengawasan.²¹⁰

Sebuah program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan kita akan melihat apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: (1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, (2) mencari data yang relevan dengan penelitian dan (3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program

²⁰⁸ Nanang Erna Gunawan, *Pentingnya Sistem Kesehatan Mental dalam Setting Sekolah: Isu, Refleksi dan Prioritas*, Artikel Pendidikan untuk Perubahan Masyarakat Bermartabat, Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 227

²⁰⁹ Renna E., Dewi Mahardhika P.S., dan Yatim Riyanto, *Manajemen dalam Akreditasi di Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kota Malang*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 5 No. 6, tahun 2020

²¹⁰ Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, ..., hal, 164

tersebut.²¹¹ Begitu pula dalam pengelolaan pendidikan luar sekolah fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan merupakan fungsi yang sangat menentukan bagi tercapai tidaknya tujuan program.

Monitoring pada umumnya dilakukan baik pada waktu sebelum kegiatan pembinaan maupun bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan (pengawasan atau supervisi). Monitoring, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program. Monitoring, selain berkaitan dengan pengawasan dan supervisi, mempunyai hubungan erat dengan penilaian program. Monitoring dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus menerus dengan cara mendengar, melihat dan mengamati, dan mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut.²¹² Anwas Iskandar mengidentifikasi sepuluh patokan pendidikan luar sekolah yang menjadi sasaran monitoring yaitu: warga belajar, sumber belajar, pamong belajar, rasi belajar, kelompok belajar, sarana belajar, dana belajar, panti belajar, program belajar, dan hasil belajar.²¹³

Seperti halnya pada pengawasan di PKBM Tunas Pratama fokus pada pelaksanaan pembelajaran. Pengawasan atau monitoring pada PKBM dilakukan oleh pengelola sendiri. Monitoring keterlaksanaan pembelajaran, dengan memberikan pendampingan pada setiap tutor yang diamanatkan kepada staf yang telah dijadwalkan. Di masa normal staf mendampingi secara langsung dengan datang ke sekolah, sedangkan di masa pandemi menadampingi di setiap *room* “zoom”. Selain itu, Direktur PKBM Tunas Pratama ikut serta terjun langsung dalam memonitoring pada proses pembelajaran dengan memonitoring baik keberlangsungan pembelajaran maupun warga belajarnya.

²¹¹ Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Nonformal*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hal. 177

²¹² Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan, ...*, hal, 164

²¹³ *Ibid*, hal. 165

Bidang pendidikan ditinjau dari sarasannya, evaluasi ada yang bersifat makro dan ada yang mikro. Evaluasi yang bersifat makro sarasannya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian belajar siswa. Pencapaian belajar ini bukan hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada pada siswa. Jadi sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah tutor.²¹⁴

Beberapa pendekatan, metode dan teknik evaluasi program pendidikan luar sekolah tidak hanya berkaitan dengan operasionalisasi evaluasi program, melainkan pula berkaitan dengan peranan evaluator program. Implikasinya, apabila evaluasi dimaksudkan untuk memperbaiki program yang telah atau sedang dilakukan dan untuk merencanakan program yang akan datang, maka evaluasi program sebaiknya dilakukan oleh evaluator dari dalam (internal evaluator) yaitu pengelola, staf atau pelaksana program itu sendiri. Artinya, evaluasi merupakan bagian dari pengelolaan program. Sebaliknya, apabila evaluasi dimaksudkan untuk menetapkan nilai, kebermaknaan, atau kemanfaatan program, maka evaluasi program akan lebih baik apabila dilakukan oleh evaluator atau lembaga yang berasal dari luar.²¹⁵

Evaluator dari dalam dapat terdiri dari berbagai tenaga. Ke dalam tenaga evaluator ini termasuk staf pengelola atau tenaga pelaksana program yang telah mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi, pendukung atau penasihat program, pelaksana yang terlibat dalam program yang mengenal kebaikan dan/atau keburukan program terutama terhadap unsur-unsur program yang menjadi kepedulian tenaga yang bersangkutan.²¹⁶ Di PKBM Tunas Pratama evaluasi internal dilaksanakan setiap hari dalam proses pembelajaran dan rapat besar pada setiap semester, yaitu pada rapat persiapan ajaran baru, rapat persiapan semester genap maupun ganjil, sidang kelulusan, dan rapat koordinasi secara insidental. Sedangkan evaluator dari luar sesuai dengan

²¹⁴ Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan, ...*, hal. 175

²¹⁵ *Ibid*, hal. 181

²¹⁶ *Ibid*, hal. 182

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.²¹⁷ Evaluasi eksternal dilaksanakan setiap hari dalam proses pembelajaran dan rapat besar pada setiap semester, yaitu pada rapat persiapan ajaran baru, rapat persiapan semester genap maupun ganjil, sidang kelulusan, dan rapat koordinasi secara insidental.

²¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal tentang Standar Nasional Pendidikan